

2019



**PEMERITAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
TATA RUANG DAN PERTANAHAN**

Jl. Jalan Raya Bukit Patanahan – Bangun Rejo Telp. (0755) 583341 Padang Aro

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN (LAKIP)
ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH
(OPD)
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019 dapat disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, utamanya dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh **Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999** yakni berupa pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Anggaran 2019 juga dimaksudkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas kinerja aparat jajaran Dinas Pekerjaan Umum. Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja aparat Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Kami informasikan juga bahwa sasaran dan kegiatan yang diangkat dan diukur pada laporan ini hanyalah sasaran dan kegiatan pokok saja yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan. Adapun sasaran dan kegiatan secara menyeluruh dan rinci diukur pada Laporan Akuntabilitas Kinerja setiap satuan bidang yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan.

Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan di masa mendatang.

Padang Aro, Januari 2020
Kepala Dinas



HANIF RASIMON, ST.MT
NIP. 19720410 200212 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tuntutan agar pemerintah senantiasa dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil merupakan sesuatu yang mutlak dilaksanakan. Hal ini semakin diperkuat dengan lahirnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diikuti Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menghadapi kondisi ini, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Tata Ruang dan Pertanahan kedepan tentunya menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat. Untuk memenuhi tuntutan tersebut Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Tata Ruang dan Pertanahan menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan misi dalam rangka mencapai visinya.

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Tata Ruang dan Pertanahan memiliki 8 (delapan) sasaran yang dirinci lagi menjadi 14 (Empat Belas) program dengan 45 (Empat puluh Lima) kegiatan, dimana sebagian dari kegiatan tersebut dapat dilaksanakan, hanya sebagian kecil lagi tidak dapat dilaksanakan karena pembebasan lahan dan kelalaian dari Pihak Kedua . Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan diperoleh prosentase pencapaian Kinerja Kegiatan Fisik sebesar 74,69% dan Kinerja Keuangan 90,23% (Rp 187.980.135.922,-).

Secara keseluruhan kegiatan – kegiatan yang ada dapat terselesaikan dengan baik. namun ada 7 (Tujuh) paket pekerjaan yang tidak terlaksana yang terdiri dari 1 (satu) Pekerjaan Pembangunan Jembatan, 2 (Dua) Pembangun Jalan dan 3 (Tiga) paket pekerjaan pengewasan yang tidak terlaksana.

Selain itu ada paket pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dikarenakan ada bencana alam. Sedangkan untuk paket pekerjaan yang tidak selesai ada 2 (Dua) Paket pekerjaan.

Untuk paket kegiatan yang lainnya dapat terselesaikan dengan baik. Faktor eksternal berupa kondisi pemerintahan yang berjalan cukup kondusif di Tahun 2019 mempengaruhi tingkat kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan . Namun demikian keberhasilan yang telah dicapai tersebut perlu mendapat dukungan dari semua pihak agar dapat lebih ditingkatkan lagi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Tata Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Tata Ruang dan Pertanahan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program dan kegiatan di tahun berikutnya, Sehingga program dan kegiatan di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kedudukan	2
D. Struktur Organisasi	3
E. Isu Strategik	4
F. Sistematika LAKIP	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	6
B. Rencana Kinerja Tahun 2017	7
C. Penetapan Kinerja Tahun 2017	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017	
A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja	11
B. Analisis Atas Pencapaian Sasaran Strategik	11
C. Analisis Atas Pencapaian Keuangan	12
D. Analisis terhadap Kegiatan yang tidak terlaksana	17
BAB IV. PENUTUP	
A. Keberhasilan	18
B. Hambatan/masalah	18
C. Pemecahan masalah	19
LAMPIRAN :	
1. Bagan Susunan Organisasi Tahun 2019	
2. Rencana Strategis 2016-2021	
3. Rencana Kinerja Tahun 2019	
4. Penetapan Kinerja Tahun 2019	
5. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik Tahun 2019	
6. Daftar kegiatan yang tidak terlaksana/belum selesai Tahun Anggaran 2019	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1. Visi

Terwujudnya sarana prasarana Infrastruktur Bidang PUTRP yang handal dan mampu melayani kebutuhan masyarakat secara merata di Kabupaten Solok Selatan.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi untuk dapat membuat, mengaplikasi dan mengevaluasi strategi. Misi juga haruslah berfokuskan pada kebutuhan pengguna masyarakat dan kegunaan dari sebuah perencanaan. Adapun Misi dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan produk hukum daerah, kesadaran hukum, penegakkan serta kepastian hukum.
2. Mewujudkan Perencanaan, Pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan akasebilitas dan konektivitas antar wilayah.
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang.
5. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Air.
6. Mewujudkan sarana dan prasarana sosial lainnya yang berkualitas.
7. Mendukung mewujudkan masyarakat yang religius.
8. Mendukung percepatan pembangunan destinasi pariwisata sesuai potensi daerah kearifan lokal.

9. Mewujudkan kualitas SDM yang profesional pada semua lapisan manajemen.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan utamanya dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh **Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999** yakni berupa pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2019 juga dimaksudkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas kinerja aparat jajaran Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja aparat Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

C. Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerinthan di Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Solok, Tata Ruang dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan Administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya.

- e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan pimpinan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi perencanaan dan Pengendalian Bangunan ;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengawasan Bangunan ;
 - 3. Seksi Jasa konstruksi ;
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 2. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Jalan, Sarana dan Prasarana Jalan
- e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) terdiri dari :
 - 1. Seksi Penataan Gunaan SDA
 - 2. Seksi Pengembangan Parsarana Irigasi, Danau dan Rawa
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan SDA
- f. Bidang Tata dan Pertanahan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Tata Ruang
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
 - 3. Seksi Pertanahan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran LAKIP ini.

2. Jumlah Pegawai

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan seluruhnya berjumlah 142 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 74 orang, Tenaga Kontrak Daerah 68 orang dan Tenaga Sukarela 10 Orang.

E. Isu Strategik

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan merupakan salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang secara langsung berperan dalam mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan. Sebagai salah satu Dinas yang terkait dalam menunjang pembangunan sarana dan prasarana daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas yang memadai.

Isu strategik yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2019 adalah Percepatan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur di bidang ke PU-an Tata Ruang dan Pertanahan yang handal dan merata di Kabupaten Solok Selatan yaitu :

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui pemerintah penyelenggaraan pemerintah yang aspiratif, partisipatif dan transparan dengan :
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur perencana, dan optimalisasi peran aparat fungsional pemerintah (APFP) dalam melaksanakan pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Peningkatan fungsi dewan sebagai lembaga yang aspiratif dilaksanakan melalui mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan melalui optimalisasi hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan mengoptimalkan menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, rapat dengan pendapat, dan kegiatan lainnya.
 - c. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan melalui penguatan regulasi pedoman kerja dengan menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) di masing – masing layanan.
 - d. Peningkatan layanan kepala/wakil kepala daerah dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi antar pemerintah baik antar pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi dan pusat.

- e. Peningkatan Pengelolaan Keuangan daerah melalui optimalisasi perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah, menstandarkan kualitas Sumber Daya Aparatur pengelola keuangan melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi tentang regulasi keuangan, aset, dan pendapatan daerah serta optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- f. Peningkatan Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah dilaksanakan melalui peningkatan kinerja dan realisasi keuangan daerah dan optimalisasi penerapan sistem Pengawasan Internal Pemerintah.
- g. Peningkatan penataan peraturan perundang – undangan dengan menggali sumber – sumber regulasi, mengkonsultasikan serta menyusun regulasi tata kelola pemerintahan.
- h. Meningkatkan penataan kelembagaan melalui harmonisasi kelembagaan pemerintah Kabupaten dengan pemerintah provinsi, pusat dan peraturan perundang – undangan.
- i. Peningkatan Pengelolaan aparatur daerah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dengan proses rekrutman yang akuntabel.
- j. Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan melalui sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengurus ijinnya melakukan pengendalian terhadap pelanggaran perijinan dan melaksanakan pelayanan perijinan satu pintu.
- k. Peningkatan Pengelolaan Sistem Pertanahan dilaksanakan dengan menginventarisasi aset tanah milik pemerintah daerah, melaksanakan proses pensertifikatan, dan melaksanakan sosialisasi kepada lembaga adat untuk melaksanakan inventarisasi dan pensertifikatan aset adat.

Dalam pencapaian target sesuai dengan isu strategik berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan masih memiliki banyak kendala dan permasalahan. Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM ataupun RPJMD Tahun 2016-2021. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Sekretariat

- a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal;
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat;
- c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas belum optimal;
- d. Belum ada kode etik/aturan perilaku yang diinternalisasikan dengan baik;
- e. Pendapatan/Sistem Penggajian belum berbasis kinerja;
- f. Pernyataan Kode Etik/Pernyataan Integritas belum disusun/ditandatangani;
- g. Belum adanya unit khusus yang menangani pengaduan masyarakat;
- h. Strategi dan perencanaan kompetensi pegawai belum disusun;
- i. Pemantauan kompetensi SDM belum efektif;
- j. Belum optimalnya data dan informasi Dinas yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- k. Belum dilakukan pelatihan yang memadai sebelum pegawai menduduki posisi penting;
- l. SOP/Prosedur untuk penilaian kompetensi pegawai belum ada;
- m. Belum ada assesment/penilaian kompetensi dari individu kunci;
- n. Kesesuaian keahlian dengan uraian tugas belum diperhitungkan dalam penilaian kinerja;
- o. Belum seluruh pegawai dapat diandalkan untuk mencapai tujuan pengendalian intern;
- p. Belum seluruh resiko pengendalian dan ketaatan telah disusun;
- q. Kepemimpinan organisasi belum memadai;
- r. Proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi belum dilakukan secara berkala;
- s. Program perencanaan dan anggaran pengembangan SDM belum memadai;
- t. Evaluasi kinerja manajemen belum dilaksanakan secara periodik;
- u. Peran aktif Dinas sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam urusan Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan masih perlu ditingkatkan;
- v. Keterbatasan SDM, di mana Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan masih membutuhkan jumlah pegawai yang cukup banyak serta siap pakai dengan latar belakang pendidikan teknik sipil, ekonomi Pembangunan/Akuntansi;

- w. Minimnya Fasilitas kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam mendukung fungsi perencanaan dan pengawasan;
- x. Minimnya fasilitas pendukung kerja seperti alat ukur teodolit, GPS, Laptop, Komputer dan lain lain;
- y. Belum adanya Workshop dan bengkel untuk mendukung pelayanan alat berat;
- z. Belum Adanya fasilitas Laboratorium.

2. Identifikasi Permasalahan Sub Bagian Perencanaan

Pada Sub Bagian Penyusunan Program di 10 item tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan, terdapat permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya di Dinas PU Tata Ruang dan Pertanahan. Permasalahan dimaksud adalah :

- a. Belum tersedianya data base jalan lingkungan yang memadai sebagai pedoman dalam pemrograman betonisasi jalan lingkungan yang diprioritaskan Kepala Daerah terpilih;
- b. Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase Skala Kabupaten, sebagai pedoman pokok untuk pemrograman kegiatan-kegiatan pengendalian banjir di Kabupaten Solok Selatan. Untuk penuntasan pengendalian banjir di Kabupaten Solok Selatan diperlukan grand disain program dan kegiatan pengendalian banjir dan genangan pada seluruh kawasan administrasi kota agar mampu mensinergikan semua system drainase yang ada di Kabupaten. Jika dibandingkan dengan panjang jalan kabupaten yaitu 1.980,58 km, berarti panjang drainase yang ideal minimal 2 kali panjang jalan atau 3.961,16 km. Dari sini terlihat perlunya dilakukan pendataan/studi tentang drainase skala kabupaten. Selain itu Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase Skala Kabupaten juga diperlukan dalam mengusulkan dana untuk APBD Propinsi dan APBN karena itu merupakan salah satu syarat dalam pengusulan dana.
- c. Belum tersedianya Rencana Indusk Sistem Irigasi yang up-to-date. Dokumen perencanaan jaringan irigasi yang ada baru perencanaan inventarisasi skema petak dan jaringan, yang sudah dilengkapi dengan data parcial, luas lahan pertanian sawah yang sebenarnya, dan itu baru sebagian daerah Irigasi (DI) belum secara keseluruhan.
- d. Belum tersedianya Data Base Gedung perkantoran di Kabupaten Solok Selatan.

3. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Bina Marga

Hasil identifikasi permasalahan pada Bidang Bina Marga berdasarkan Tupoksinya, adalah sebagai berikut :

- a. Masih banyaknya jalan dan jembatan dengan kondisi rusak dan kurang baik (jalan kabupaten/Prov/Negara/non status (jalan konsisi baik 40%);
- b. Analisa dan penghitungan indikator Aksesibilitas, mobilitas dan keselamatan dalam SPM Dinas Pekerjaan Umum belum bisa dilakukan karena terkendala masalah data yang tidak ada. Hal ini membutuhkan survey lanjutan yang belum bisa dilaksanakan karena ketidaktersediaan dana dan personil. Selain itu juga tidak adanya alat yang diperlukan dalam menghitung indikator keselamatan tersebut seperti alat Roughness.
- c. Masih banyaknya jalan lingkungan yang berkondisi rusak
- d. Masih ada beberapa daerah atau nagari yang terisolir karena tidak adanya akses jalan dan jembatan (Sungai Sirih – Simancuang, Sapan Salak – Pakan Rabaa, Lubuk Ulang Aling, Sitapus - Sei. Penuh, Sei Penuh - Lubuk Ulang Aling)
- e. Belum terlaksananya pemasangan dan pemeliharaan plank nama-nama jalan sebagaimana mestinya;
- f. Belum adanya ruas jalan di Kabupaten yang memiliki sertifikat laik fungsi;
- g. Belum tersedianya data base untuk jalan lingkungan;
- h. Masih terdapat 633,24 km jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat yang perlu diperbaiki dengan program peningkatan jalan;
- i. Terdapat ruas jalan yang memerlukan program pemeliharaan periodic dan memerlukan program pemeliharaan rutin setiap tahun;
- j. Beberapa peralatan kebinamargaan sudah berumur tua, dan sering rusak saat dioperasikan;
- k. Masih kurangnya dukungan sarana peralatan kebinamargaan seperti excavator mini, mobil truk terado, truk UPR, dan unit dump truk, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemeliharaan jalan dan jembatan menjadi lambat;
- l. Minimnya SDM kebinamargaan dibandingkan dengan ruas jalan yang ada;
- m. Kurangnya evaluasi dan pengawasan pemanfaatan jalan yang berpengaruh pada kondisi jalan.

4. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi

- a. Masih banyak para pelaksana kegiatan pembangunan gedung pemerintah pada SKPD yang belum memahami ketentuan pembangunan gedung Negara sebagaimana diatur pada Perpres No. 73 tahun 2011 dan Permen PU No. 45 Tahun 2007;
- b. Pembangunan saluran drainase belum didukung oleh suatu system perencanaan dan pemrograman yang akurat;
- c. Masih minimnya sarana dan prasarna gedung kantor pemerintah dan olah raga;
- d. Belum tertatanya fungsi pasar secara optimal.
- e. Sarana dan prasarana ke Objek wisata yang belum memadai (jalan menuju objek wisata, menara pandang, gerbang dll).

5. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang PSDA

- a. Tingkat Capaian SPM pada ketersediaan air irigasi baru mencapai 75 % dari luas Daerah Irigasi yang harus dilayani, sehingga perlu dilanjutkan pembangunannya;
- b. Belum adanya kegiatan yang direalisasikan/ dilaksanakan di dinas PU Kab. Solok Selatan dalam mendukung SPM indikator 1 antara lain pengaturan, survey, serta Land Acquisition, Operation & Maintenance, dan pengawasan. Sedangkan untuk construction belum dapat dilakukan penghitungan SPM-nya karena terkendala masalah ketersediaan data. Data yang masuk baru berupa dana konstruksi yaitu pada tahun 2014 sebesar 2.815.932.000,00 sedangkan data jenis kegiatan konstruksinya tidak tersedia seperti panjang pipa transmisi, Bangunannya, dan lain-lain;
- c. Sumber air baku yang digunakan masih sama dengan tahun 2014, namun kalkulasi secara keseluruhan belum tekoordinasi dengan instansi pengelola lainnya;
- d. Data yang tersedia hanya jenis dan luas D.I, sedangkan data luas areal realisasi tanam serta data Masa Tanam (MT) tidak tersedia. Untuk pengumpulan data tersebut membutuhkan survey lanjutan sedangkan untuk jumlah D.I di Kab. Solok Selatan sebanyak 85 Buah tidak tersedia dana untuk melaksanakan kegiatan survey tersebut. Kendala lain adalah di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) muncul D.I baru yang tidak termasuk dalam data inventaris irigasi sehingga menyebabkan kesulitan dalam penyusunan pembiayaan SPM indikator 2;
- e. Rata – rata kebutuhan air per ha belum ada karena petugas pengairan yang akan mencatat belum ada, hanya petugas pengelola air yang hanya bertugas

membersihkan dan memastikan OP irigasi lancar. Hal ini disebabkan PPA ini hanya digaji Rp. 500/bln. Agar kegiatan ini dilaksanakan dimasa yang akan datang jika dianggarkan biaya operasional dari PPA tersebut;

- f. Belum optimalnya jaringan irigasi untuk pertanian rakyat.;
- g. Masih banyaknya kawasan persawahan yang belum memiliki irigasi non teknis) saluran irigasi yang belum dibangun;
- h. Masih perlunya operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- i. Banyaknya sungai yang masih rusak dan perlu penanganan;

6. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

- a. Target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM hingga tahun 2015 mengacu pada jumlah Peta Digital dan Analog, adalah 100%, dan realisasi yang didapatkan sebesar 0% walaupun telah terlaksananya sebanyak 9 kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan maupun Kecamatan pada Kabupaten Solok Selatan serta Rencana Tata Ruang Kawasan Ekowisata Taluak Aie Putih yang dilaksanakan oleh Prasjaltarkim Propinsi Sumatera Barat pada Tahun 2013. Ini disebabkan karena tidak tersedianya dana untuk memperbanyak peta yang dimaksud untuk disebarakan kesetiap kecamatan.
- b. Belum adanya rencana pengembangan infrastruktur berbasis kawasan yang didasarkan pada pola ruang (termasuk kawasan ibukota kabupaten);
- c. Belum optimalnya pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan pengaturan ruang;
- d. Masih sering terjadi konflik pemanfaatan ruang (tumpang tindih izin antar perusahaan, antara perusahaan dan masyarakat, deforestasi);
- e. Lemahnya sinkronisasi penataan ruang terhadap pelaksanaan pembangunan;
- f. Belum tuntasnya masalah penegasan batas antara kabupaten, kecamatan dan nagari;
- g. Belum adanya regulasi Tata Ruang sebagai turunan Perda RTRW;
- h. Belum optimalnya kualitas pemanfaatan ruang;
- i. Belum optimalnya pengendalian kualitas pemanfaatan ruang.
- j. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran indikator ini belum terlaksana karena belum adanya laporan tentang pelanggaran tersebut;

F. Sistematika LAKIP / Perjanjian Kinerja

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / Pelaporan Kinerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 4 (empat) Bab yang berisikan hal-hal sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan, kedudukan, Struktur Organisasi, Isu Strategik, serta Sistematika Penulisan LAKIP.

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Memuat Rencana Strategis, Rencana Kinerja tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Memuat Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja, Analisis Atas Pencapaian Sasaran Strategik dan Analisa Atas Capaian Keuangan 2017.

BAB IV Penutup

Memuat kesimpulan yang berisikan hambatan, masalah serta solusi atas masalah tersebut.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan maka dijabarkan kedalam bentuk tujuan yang lebih profesional sehingga dapat lebih terarah dan teratur. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan adalah :

Tabel :
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Solok Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan Pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pembangunan kawasan strategis cepat tumbuh	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan kabupaten	Persentase jalan di sisi baik
			Persentase jembatan dalam kondisi baik
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur keciptakaryaan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan
			Persentase drainase dalam kondisi baik
			Akses air minum layak (%)
			Akses sanitasi layak (%)
			Persentase pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pengairan/sumber daya air	Luas daerah irigasi dalam kondisi baik (ha)

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan membuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan yang dibuat yaitu :

I	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
4	Penyediaan alat tulis kantor
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	Penyediaan Makanan dan Minuman
8	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
II	Program : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
1	Pembangunan Gedung Kantor
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal
2	Sosialisasi peraturan perundang - undangan
IV	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
V	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan
1	Perencanaan Pembangunan Jalan
2	Perencanaan Pembangunan Jembatan
3	Pembangunan Jembatan
4	Peningkatan Jalan Ruas Jalan
5	Peningkatan Ruas Jalan (DAK Reguler)
6	Peningkatan Ruas Jalan (DAK AFIRMASI)
VI	Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong
1	Pembangunan saluran drainase/gorong - gorong

VII	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
2.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
VIII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat
IX	Program : Penataan Ruang Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah
2	Perencanaan Pengadaan Tanah
3	Persiapan Pengadaan Tanah
4	Pelaksanaan Pengadaan Tanah
5	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
X	Program : Pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan Lainnya
1	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
2	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai
3	Pembangunan / Peningkatan/ Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
4	Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
5	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Dibangun
6	Pembangunan / Peningkatan/ Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Alokasi Dana Khusus)
XI	Program : Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh
1	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur
2	Pembangunan dan peningkatan Pasar
XII	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan
XIII	Program : Penataan Ruang
1	Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, RBTL
2	Fasilitasi badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
3	Rapat Koordinasi Tata Ruang Tentang Rencana
4	Revisi Rencana Tata Ruang
XIV	Program : Penataan Ruang
1	Monitoring evaluasi dan pelaporan
XV	Program Peningkatan Keagamaan

1	Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Solok Selatan (Tahun Jamak)
---	--

C. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Yang dimaksud dengan Penetapan kinerja adalah Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dokumen Penetapan Kinerja ini disusun oleh satuan kerja dan unit kerja eselon II setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja.

Adapun Penetapan Kinerja (TAPKIN) / Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 dimaksud dibawah ini :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara **target kinerja** yang sudah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dengan **realisasi kinerja** yang terlaksana pada tahun tersebut, Pengukuran Kinerja ini dilakukan setiap akhir periode/tahun anggaran yang diukur.

Proses Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts, menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan mempunyai 44 (empat puluh empat) kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan.

B. Analisis Atas Pencapaian Sasaran Strategik

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir Pengukuran Kinerja diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada tahun 2019 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Namun mengingat anggaran yang sangat terbatas dan kurangnya Sumber Daya Manusia, maka kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan tahun 2019 belum optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya, menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu, mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang dapat meningkat.

Secara keseluruhan kegiatan – kegiatan yang ada dapat terselesaikan dengan baik. namun ada 7 (Tujuh) paket pekerjaan yang tidak terlaksana yang terdiri dari 1 (satu) Pekerjaan Pembangunan Jembatan, 2 (Dua) Pembangunan Jalan dan 3 (Tiga) paket pekerjaan pengewasan yang tidak terlaksana.

Selain itu ada paket pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dikarenakan ada bencana alam. Sedangkan untuk paket pekerjaan yang tidak selesai ada 2 (Dua) Paket pekerjaan.

Beberapa Pekerjaan yang tidak terlaksana disebabkan beberapa faktor diantaranya :

1. Tidak adanya kejelasan lokasi pengusulan
2. Lahan tidak bebas sampai akhir tahun anggaran.
3. Kelalaian pada pihak ke tiga / rekanan.

C. Analisis Atas Pencapaian Keuangan 2017

1. Anggaran Rutin

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, Dana APBD tersebut tertuang dalam DPA Dinas PUTRP yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja. Selanjutnya jika kita bandingkan antara harapan dengan kenyataan di lapangan intinya anggaran tersebut masih jauh dari yang diharapkan.

2. Anggaran Pembangunan

Selain anggaran yang berasal dari Daerah APBD tahun anggaran 2019, Dinas PUTRP

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir Pengukuran Kinerja diperoleh kesimpulan bahwa tingkat pencapaian kinerja keuangan Fisik Dinas PUTRP sebesar 90,23%, dengan Jumlah Anggaran tahun 2019 Rp 208.325.955.989,- sedangkan jumlah anggaran yang terserap hanya Rp 187.980.135.922,- . Tingkat capaian ini lebih rendah dari pada tingkat pencapaian kinerja kegiatan sebesar 90,23 %. Hal ini karena untuk mengukur pencapaian kinerja keuangan dilakukan dengan membandingkan antara realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut.

Sedangkan untuk tingkat pencapaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan indikator output berupa jumlah paket atau unit dari suatu kegiatan dibandingkan dengan target jumlah paket atau unit dari kegiatan tersebut.

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja dalam 3 tahun terakhir (tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019)

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017		2018		2019		PROGRAM/KEGIATAN
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	Tersedianya Gedung Kantor yang representatif.	Unit	17	94,44 %	12	92,86 %	5	100 %	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Tersedianya Dokumen perencanaan lengkap dan akurat dan terlaksananya pengawasan terhadap pembangunan kantor	paket			7	100%	7	100%	
	Terjaganya kondisi Alat Berat	Unit	4	80 %	4	80 %	4	100 %	
2	Tersedianya dokumen perencanaan yang lengkap dan akurat	paket	3	30 %	6	100%	10	100%	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Tertaksana Pembangunan Jembatan Kabupaten dengan baik	paket	5	83,33 %	22	95,45 %	37	13,86 %	
	Tertaksana Pembangunan Jalan Kabupaten dengan baik	paket			22	91,67 %	30	85,71 %	
3	Tertaksana Pembangunan Jalan Kabupaten dengan baik.	paket	28	100 %	28	100 %	5	100 %	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Tercapainya Perbaikan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	paket	1	16,67 %	12	100 %	10	90,91%	

	Terpeliharanya Jalan Kabupaten secara berkala.	paket	1	100 %	1	100 %	60	92,31%	2	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
	Terpeliharanya Jalan Kabupaten secara berkala.	paket	1	100 %	1	100 %	1	100 %	3	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan/ Jembatan (Alokasi Dana Bantuan bersifat Khusus)
5									Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang lengkap dan akurat.	paket	2	66,67 %	3	100 %	3	100 %	1	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang lengkap dan akurat.	paket	2	66,67 %	2	100 %	2	100 %	2	Perencanaan Normalisasi Sungai
	Terlaksananya pemeliharaan jaringan areal irigasi secara berkala.	paket	65	73,4 %	58	100 %	64	100 %	3	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
	Terlaksananya Rehab/ pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai, sehingga aliran sungai dapat dinormalkan kembali.	paket	22	100 %	24	99%	30	99%	4	Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Sungai
	Terlaksananya pemeliharaan jaringan areal irigasi secara berkala.	paket			1	100 %	1	100 %	5	Optimalisasi fungsi Jaringan yang telah dibangun
	Terlaksananya Pendampingan WISMIP yang baik	paket	2	50 %	4	100 %	0	0ss %	6	Pendampingan WISMIP (Solok Selatan)*)
	Terlaksananya pemeliharaan jaringan areal irigasi secara berkala.	paket	0	0	3	100%	3	100%	7	Pemb/pening/rehab. Permel jaringan Irigai (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus)
	Terlaksananya Rehab/ pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai, sehingga aliran sungai dapat dinormalkan kembali.	paket	0	50 %	3	100 %	3	100 %	8	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran sungai (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus)

D. Analisa terhadap Kegiatan yang tidak terlaksana dan ketidak tercapaian target kerja

Beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dan menyebabkan ketidak tercapaian target kerja umumnya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Beberapa kegiatan baru diusulkan dalam DPA Perubahan T.A 2019 sehingga tidak cukup waktu penyelesaian di akhir tahun anggaran.
2. Permasalahan dalam pembebasan lahan sehingga beberapa kegiatan pembangunan fisik tidak dapat dilakukan
3. Kelalaian dari penyedia dalam melakukan pekerjaan finishing

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tugas pokok, fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan kepada semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur ke-PUTRP-an selama Tahun Anggaran 2019 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan tahun 2019 telah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa paket kegiatan yang tidak terealisasi. Namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Hal ini didukung fakta kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan telah berhasil merealisasikan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari kebijakan-kebijakan yang telah disepakati.

Mengenai keberhasilan, hambatan dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut :

A. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain meningkatnya :

1. Meningkatnya kualitas/kuantitas sarana dan prasarana Aparatur.
2. Meningkatnya kualitas/kuantitas sarana dan prasarana Publik
3. Meningkatnya kualitas/kuantitas pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kualitas/kuantitas SDM penyelenggaraan.

B. Hambatan/masalah

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain :

1. Belum tersedianya dana untuk mencari data pendukung kebenaran realisasi setiap indikator benefits dan impacts pada kegiatan dan indikator outcomes pada sasaran, karena hal tersebut menyangkut hasil yang dirasakan oleh

masyarakat intern/ekstern, tentunya pencapaiannya harus didukung oleh data yang akurat dan obyektif;

2. Situasi keuangan Pemerintah Daerah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan, sehingga hasil yang maksimal belum terwujud;

C. Pemecahan masalah

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :

1. Mengusahakan alokasi dana untuk mengevaluasi/mencari data kebenaran daripada realisasi indikator benefits, dan impacts pada kegiatan dan indikator outcomes pada sasaran;
2. Menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu dan memilih program dan sasaran yang sangat prioritas yang memiliki kontribusi yang tinggi pada visi dan misi serta mengalokasikan dana merujuk kepada pencapaian hasil yang diharapkan;



Padang Aro, Januari 2020
Kepala Dinas

HANIF RASIMON, ST.MT
NIP. 19720410 200212 1 006